**Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia**



Disusun Oleh :

Nama : Dinda Elvina

NIM : 2300024040

**Fakultas Hukum Univeristas Ahmad Dahlan Yogyakarta**

Daftar Isi

[A. Pendahuluan 3](#_Toc172485466)

[1. Latar Belakang 4](#_Toc172485467)

[2. Rumusan Masalah 5](#_Toc172485468)

[B. Pembahasan 6](#_Toc172485469)

[C. Kesimpulan 13](#_Toc172485470)

[D. Daftar Pustaka 16](#_Toc172485471)

# A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan dan hak kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Di Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, kualitas demokrasi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu upaya penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) berperan krusial dalam membekali individu dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia, dirancang untuk membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat sejak usia dini. Kurikulum ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, serta prinsip-prinsip demokrasi. Melalui pembelajaran ini, diharapkan generasi muda dapat memahami pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam implementasi PKN adalah bagaimana memastikan bahwa pendidikan ini benar-benar efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Faktor-faktor seperti kualitas pengajaran, kurikulum yang relevan, dan keterlibatan siswa dalam kegiatan demokratis menjadi elemen-elemen yang mempengaruhi hasil pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana PKN telah berhasil dalam mencapai tujuannya dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan.

Dalam makalah ini, akan dibahas peran PKN dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana pendidikan ini dapat mempengaruhi pemahaman dan partisipasi warga negara dalam sistem demokrasi. Analisis ini akan mencakup tinjauan literatur terkait, evaluasi praktik pendidikan kewarganegaraan, dan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pendidikan dalam konteks demokrasi.

## 1. Latar Belakang

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) adalah salah satu mata pelajaran yang diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia dengan tujuan utama untuk membentuk karakter dan kesadaran politik siswa. Mengingat peran sentral demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, PKN diharapkan dapat memberikan fondasi yang kuat bagi generasi muda untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi yang sehat dan berkualitas membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, dan pendidikan kewarganegaraan memainkan peran kunci dalam membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif.

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi dan kompleksitas sosial, tantangan dalam implementasi demokrasi semakin beragam. Di Indonesia, masalah-masalah seperti rendahnya tingkat partisipasi politik, kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta penurunan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan yang efektif di bidang ini dapat membantu memperbaiki kondisi tersebut dengan membentuk warga negara yang lebih terinformasi, aktif, dan bertanggung jawab.

Namun, meskipun PKN merupakan bagian penting dari kurikulum pendidikan, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Beberapa di antaranya adalah kualitas materi ajar yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan aktual, metode pengajaran yang kurang menarik, serta keterbatasan dalam pelatihan guru. Kendala-kendala ini mengarah pada pertanyaan tentang sejauh mana pendidikan kewarganegaraan benar-benar mempengaruhi kualitas demokrasi dan bagaimana kurikulum serta metode pengajaran dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks tersebut, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi PKN dan dampaknya terhadap partisipasi demokratis. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan dari pendidikan kewarganegaraan saat ini, dapat diidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran PKN dalam konteks ini, dengan harapan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi pengembangan kebijakan pendidikan dan praktik demokrasi di tanah air.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk pemahaman dan kesadaran politik siswa di Indonesia?

Masalah ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana materi dan metode pengajaran PKN dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta struktur pemerintahan.

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah-sekolah Indonesia?

Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan PKN, seperti kualitas materi ajar, metode pengajaran, pelatihan guru, dan dukungan dari pihak sekolah.

1. Bagaimana dampak Pendidikan Kewarganegaraan terhadap partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi?

Rumusan masalah ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan tingkat partisipasi politik siswa, baik dalam pemilihan umum maupun kegiatan demokratis lainnya, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada kualitas demokrasi di Indonesia.

1. Apa saja langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam mendukung demokrasi yang lebih baik?

Fokus pada masalah ini adalah untuk mengeksplorasi rekomendasi dan strategi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pendidikan kewarganegaraan, termasuk pengembangan kurikulum, metode pengajaran, dan pelatihan bagi pendidik.

# B. Pembahasan

1. Efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Pemahaman dan Kesadaran Politik Siswa

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) merupakan salah satu mata pelajaran esensial dalam kurikulum pendidikan di Indonesia yang dirancang untuk membentuk pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, prinsip-prinsip demokrasi, serta struktur pemerintahan. PKN diharapkan dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa PKN memiliki tujuan untuk menghasilkan warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam proses demokrasi secara efektif (UU No. 20/2003). Dengan penekanan pada pendidikan yang berkualitas, PKN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman tentang sistem pemerintahan di kalangan siswa.

Penelitian oleh Azwar (2019) mengungkapkan bahwa implementasi PKN di sekolah-sekolah Indonesia memberikan dampak positif terhadap pemahaman siswa mengenai sistem pemerintahan dan hak-hak sebagai warga negara. Azwar menemukan bahwa siswa yang mengikuti program PKN dengan metode pengajaran yang interaktif, seperti diskusi kelompok, simulasi pemilihan, dan peran aktif dalam kegiatan demokratis, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan mereka mengenai prinsip-prinsip demokrasi dan peran mereka dalam sistem politik. Metode pengajaran yang inovatif ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep kompleks dengan cara yang lebih mudah diakses dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka (Azwar, M. 2019. "Pendidikan Kewarganegaraan dan Kesadaran Politik Siswa". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 14(1), 23-37).

Meskipun demikian, efektivitas PKN tidak selalu konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian oleh Huda dan Mustofa (2020) menunjukkan bahwa kualitas pengajaran PKN dapat bervariasi secara signifikan antara sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas pendidikan yang baik dan yang kurang memadai. Sekolah dengan fasilitas yang memadai, termasuk buku ajar yang terbaru, teknologi pembelajaran yang canggih, dan dukungan dari administrasi, cenderung mampu memberikan pendidikan kewarganegaraan yang lebih efektif.

Sebaliknya, sekolah-sekolah yang kekurangan sumber daya sering kali menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum PKN secara optimal, yang dapat mengakibatkan perbedaan dalam tingkat pemahaman siswa mengenai prinsip-prinsip demokrasi (Huda, M., & Mustofa, A. 2020. "Variasi Efektivitas PKN di Berbagai Sekolah". Jurnal Pendidikan dan Sosial, 19(2), 45-58).

Selain faktor-faktor internal sekolah, pelatihan guru juga memainkan peran penting dalam efektivitas PKN. Guru PKN yang memiliki pelatihan yang memadai mengenai metode pengajaran yang efektif dan up-to-date cenderung lebih mampu mengajarkan materi dengan cara yang menarik dan relevan. Namun, banyak guru PKN yang tidak mendapatkan pelatihan yang cukup, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Menurut penelitian oleh Junaidi dan Yuliana (2021), ketidakseimbangan dalam pelatihan dan pengembangan profesional guru dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan, pada akhirnya, pemahaman siswa mengenai kewarganegaraan dan demokrasi (Junaidi, R., & Yuliana, S. 2021. "Pelatihan Guru dan Efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan". Jurnal Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran, 17(3), 89-104).

Kendala lain yang mempengaruhi efektivitas PKN adalah kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah dalam penyediaan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelajaran kewarganegaraan. Laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2021 mengungkapkan bahwa banyak sekolah masih mengalami kesulitan dalam menyediakan materi ajar yang relevan dan teknologi pendidikan yang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan guru dalam mengajar dan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa (Kemendikbud. 2021. "Laporan Investasi Pendidikan dan Fasilitas Sekolah").

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas PKN, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pembaharuan kurikulum, peningkatan pelatihan bagi guru, dan perbaikan fasilitas pendidikan. Implementasi metode pengajaran yang inovatif dan interaktif juga dapat membantu siswa memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut, PKN dapat lebih efektif dalam membentuk pemahaman dan kesadaran politik siswa, sehingga mendukung pengembangan kualitas demokrasi di Indonesia.

2. Kendala dalam Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang signifikan yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah kualitas materi ajar dan metode pengajaran yang digunakan dalam program PKN. Menurut Surya (2018), kurikulum PKN sering kali dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern dan tidak cukup memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang ada sering kali tidak mencakup isu-isu kontemporer dan perkembangan terbaru dalam politik dan pemerintahan, sehingga siswa mungkin merasa materi yang diajarkan tidak sesuai dengan situasi dan tantangan nyata yang mereka hadapi di masyarakat (Surya, I. 2018. "Tantangan dalam Implementasi Kurikulum PKN". Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran, 12(3), 67-82). Kurikulum yang tidak relevan dapat mengakibatkan siswa kehilangan minat dan motivasi untuk belajar mengenai kewarganegaraan, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas pembelajaran PKN.

Selain masalah kurikulum, pelatihan guru juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi PKN. Banyak guru PKN yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai metode pengajaran yang efektif. Penelitian oleh Yani dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa di banyak daerah terpencil, guru PKN sering kali tidak memiliki akses ke pelatihan profesional yang diperlukan untuk mengajarkan materi secara efektif. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan dalam menggunakan metode pengajaran yang modern dan inovatif yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Yani dan Prasetyo menemukan bahwa kurangnya pelatihan berakibat pada kualitas pengajaran yang tidak optimal, yang pada akhirnya berdampak pada pemahaman siswa tentang kewarganegaraan dan demokrasi (Yani, S., & Prasetyo, A. 2021. "Pelatihan Guru dan Kualitas PKN". Jurnal Pendidikan dan Pelatihan, 16(1), 89-102).

Kendala lainnya yang signifikan adalah kurangnya dukungan dari pihak sekolah dan pemerintah dalam penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk pendidikan kewarganegaraan. Laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2020 mengungkapkan bahwa banyak sekolah masih menghadapi kekurangan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelajaran PKN. Banyak sekolah tidak memiliki akses yang memadai ke materi ajar yang terkini atau teknologi pembelajaran yang modern. Kurangnya akses ini dapat menghambat kemampuan guru untuk menyampaikan materi ajar dengan cara yang efektif dan menarik. Sebagai contoh, banyak sekolah tidak memiliki laboratorium komputer atau perangkat multimedia yang diperlukan untuk mendukung metode pengajaran yang berbasis teknologi (Komnas HAM. 2020. "Laporan Tahunan Pendidikan dan Hak Asasi Manusia").

Lebih jauh, ketidakcukupan anggaran pendidikan juga menjadi masalah yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan PKN. Banyak sekolah mengalami kekurangan dana yang signifikan, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk membeli buku ajar yang berkualitas, peralatan, dan sumber daya pendidikan lainnya. Menurut laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2021, anggaran yang terbatas menyebabkan sekolah-sekolah harus mengurangi pembelian bahan ajar dan investasi dalam pelatihan guru, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan (Kemendikbud. 2021. "Laporan Investasi Pendidikan dan Fasilitas Sekolah").

Kendala struktural dalam sistem pendidikan juga mempengaruhi implementasi PKN. Beberapa sekolah menghadapi tantangan dalam integrasi PKN dengan mata pelajaran lain, sehingga mengakibatkan penurunan fokus pada pendidikan kewarganegaraan. Sistem penilaian yang sering kali lebih memprioritaskan mata pelajaran akademik seperti matematika dan sains dapat mengurangi waktu dan perhatian yang diberikan kepada PKN. Penelitian oleh Arifin dan Sari (2022) menunjukkan bahwa pemisahan PKN dari mata pelajaran lain dalam kurikulum dapat mengurangi keterkaitan antara prinsip-prinsip kewarganegaraan dan penerapannya dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa (Arifin, H., & Sari, R. 2022. "Integrasi PKN dalam Kurikulum Sekolah". Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 18(2), 77-90).

Secara keseluruhan, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pembaruan kurikulum, peningkatan pelatihan untuk guru, penyediaan fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta penyesuaian dalam sistem penilaian. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan PKN dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik siswa di Indonesia.

1. Dampak Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Politik dan Keterlibatan Masyarakat

Pendidikan Kewarganegaraan dapat mempengaruhi partisipasi politik siswa dan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi. Studi oleh Rahman dan Setiawan (2022) menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang baik lebih cenderung untuk terlibat dalam kegiatan politik, seperti pemilihan umum dan debat publik (Rahman, F., & Setiawan, R. 2022. "Pengaruh PKN terhadap Partisipasi Politik Siswa". Jurnal Demokrasi dan Politik, 21(4), 101-115).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan demokratis. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Putra (2021), yang menyebutkan bahwa siswa yang aktif dalam organisasi siswa dan kegiatan sekolah cenderung memiliki tingkat partisipasi politik yang lebih tinggi (Putra, A. 2021. "Peran Aktivitas Ekstrakurikuler dalam Partisipasi Politik". Jurnal Pendidikan Sosial, 18(2), 55-68).

Namun, efektivitas PKN dalam meningkatkan keterlibatan politik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan ekonomi. Laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2021 menunjukkan bahwa meskipun PKN berperan dalam meningkatkan pemahaman politik, keterlibatan politik di kalangan pemuda masih dipengaruhi oleh akses informasi dan kondisi sosial-ekonomi mereka (Bawaslu. 2021. "Laporan Keterlibatan Politik Pemuda").

1. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk meningkatkan efektivitas Pendidikan Kewarganegaraan, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, kurikulum PKN harus diperbarui agar lebih relevan dengan perkembangan sosial dan politik terkini. Menurut Rasyid (2019), pembaharuan kurikulum yang mencakup isu-isu kontemporer dapat membuat materi ajar lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa (Rasyid, I. 2019. "Kurikulum PKN yang Relevan". Jurnal Pendidikan dan Kurikulum, 15(1), 77-90).

Kedua, peningkatan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru PKN sangat penting. Menurut Sari dan Adi (2020), program pelatihan yang berkelanjutan dan dukungan profesional dapat membantu guru dalam mengimplementasikan metode pengajaran yang lebih efektif (Sari, N., & Adi, B. 2020. "Pengembangan Profesional Guru PKN". Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 17(3), 113-126).

Ketiga, perbaikan fasilitas pendidikan dan penyediaan sumber daya yang memadai juga diperlukan. Pemerintah dan pihak sekolah perlu memastikan bahwa sekolah-sekolah memiliki akses ke materi ajar yang berkualitas dan teknologi yang mendukung. Laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 2021 menyarankan peningkatan investasi dalam fasilitas pendidikan sebagai langkah untuk mendukung efektivitas PKN (Kemendikbud. 2021. "Laporan Investasi Pendidikan dan Fasilitas Sekolah").

Keempat, melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengembangan PKN dapat membantu menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Menurut Wulandari (2022), partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kurikulum PKN dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas program (Wulandari, R. 2022. "Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Kewarganegaraan". Jurnal Kewarganegaraan, 20(2), 95-108).

# C. Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kesadaran politik siswa di Indonesia. Berdasarkan pembahasan, jelas bahwa PKN memiliki dampak positif terhadap pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta prinsip-prinsip demokrasi. Implementasi PKN yang efektif dapat meningkatkan pengetahuan siswa mengenai struktur pemerintahan dan sistem politik, yang merupakan landasan penting untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Namun, efektivitas tersebut tidak selalu merata di seluruh wilayah, dan berbagai faktor mempengaruhi hasil pendidikan ini.

Kendala utama dalam implementasi PKN termasuk kualitas materi ajar, metode pengajaran, dan pelatihan guru. Kurikulum PKN sering kali dianggap kurang relevan dengan kebutuhan aktual, dan metode pengajaran yang kurang inovatif dapat mengurangi motivasi siswa. Selain itu, pelatihan guru yang tidak memadai dan kurangnya dukungan dari pihak sekolah serta pemerintah juga menjadi masalah signifikan yang mempengaruhi kualitas pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala ini agar PKN dapat mencapai tujuan utamanya.

Dampak PKN terhadap partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang baik dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan politik. Siswa yang mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang efektif lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan aktivitas demokratis lainnya. Namun, efektivitas PKN dalam meningkatkan keterlibatan politik juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti akses informasi dan kondisi sosial-ekonomi, yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi pendidikan.

Untuk meningkatkan efektivitas PKN, beberapa langkah perlu diambil. Pembaharuan kurikulum agar lebih relevan dengan isu-isu kontemporer, peningkatan pelatihan bagi guru, dan perbaikan fasilitas pendidikan adalah langkah-langkah penting yang perlu diimplementasikan. Pemerintah dan pihak sekolah perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa sumber daya yang memadai tersedia untuk mendukung pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengembangan PKN dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas program.

Secara keseluruhan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia jika diimplementasikan dengan baik. Mengatasi kendala yang ada dan menerapkan langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat membantu memaksimalkan manfaat dari PKN. Dengan demikian, PKN dapat berkontribusi secara signifikan dalam membentuk warga negara yang terinformasi dan aktif, serta mendukung perkembangan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

# 

# D. Daftar Pustaka

Azwar, M**.** (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Kesadaran Politik Siswa*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 14(1), 23-37.

Huda, M., & Mustofa, A**.** (2020). *Variasi Efektivitas PKN di Berbagai Sekolah*. Jurnal Pendidikan dan Sosial, 19(2), 45-58.

Yani, S., & Prasetyo, A. (2021). *Pelatihan Guru dan Kualitas PKN*. Jurnal Pendidikan dan Pelatihan, 16(1), 89-102.

Arifin, H., & Sari, R. (2022). *Integrasi PKN dalam Kurikulum Sekolah*. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 18(2), 77-90.

Surya, I. (2018). *Tantangan dalam Implementasi Kurikulum PKN*. Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran, 12(3), 67-82.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Komnas HAM. (2020). *Laporan Tahunan Pendidikan dan Hak Asasi Manusia*. Diakses dari: komnasham.go.id

Kemendikbud. (2021). *Laporan Investasi Pendidikan dan Fasilitas Sekolah*. Diakses dari: kemdikbud.go.id